



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**A**

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 6 September 2016 No. 71

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. DATA PRIBADI**

- 1. Nama : MAKMUR EFENDI, S.Pd., M.M.
- 2. Jabatan : KEPALA SEKSI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA - BIDANG SARANA, PRASARANA DAN KEMITRAAN - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 3. Alamat Kantor : Jl. KI MANGUN SARKORO NO. 12, SEMARANG
- 4. Tanggal Pelaporan : 30 Oktober 2014

**II. DATA HARTA**

<b>A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH &amp; BANGUNAN)</b>	Rp.	0
<b>B. HARTA BERGERAK</b>		
<b>a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA</b>	Rp.	6.500.000
1. Motor, merk —, tahun pembuatan 2005, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005 nilai jual Rp.6.500.000		
<b>b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA</b>	Rp.	0
<b>c. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	14.750.000

1. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2009 dengan nilai jual Rp.14.750.000

**C. SURAT BERHARGA** ..... Rp. 0

**D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA** ..... Rp. 4.369.149

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.4.369.149

**E. PIUTANG** ..... Rp. 0

**TOTAL HARTA (II)** ..... Rp. 25.619.149

**III. HUTANG** ..... Rp. 153.539.072

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.147.046.372
2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG sebesar Rp.6.492.700

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )** ..... Rp. -127.919.923

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

